



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12519-12535

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Sekuritisasi Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pada Beberapa Destinasi Wisata Pantai di Kabupaten Malang Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Nadiilah Agatha Nasywaa<sup>1✉</sup>, Moh. Fathoni Hakim<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [nadiilahagatha@gmail.com](mailto:nadiilahagatha@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Destinasi wisata pantai di Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan keamanan dan keselamatan wisatawan, tata kelola dan kesadaran wisatawan yang belum optimal menjadi faktor meningkatnya resiko kecelakaan pada destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mbingkai isu keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai ancaman dan memerlukan tindakan luar biasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor membangun narasi ancaman melalui pernyataan sehingga memunculkan proses sekuritisasi. Proses sekuritisasi dinilai berhasil karena adanya kesadaran akan ancaman terhadap wisatawan dan memunculkan tindakan seperti evaluasi tata kelola dan kerjasama antar pihak. Kesimpulan dari penelitian ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan sekuritisasi keamanan wisatawan dengan menyoroti tata kelola dan kesadaran wisatawan yang belum optimal sebagai ancaman eksistensial.

Kata Kunci: *Destinasi Pantai, Keamanan Wisatawan, Pemerintah Daerah, Sekuritisasi*

## Abstract

Beach tourism destinations in Malang Regency still face challenges in tourist security and safety, suboptimal governance and awareness of tourists are factors that increase the risk of accidents at tourist destinations. This study aims to explain how the Malang Regency Tourism and Culture Office frames the issue of tourist security and safety as a threat and requires extraordinary action. This study uses a descriptive qualitative approach with interview and documentation techniques. The results of the study show that actors build threat narratives through statements, thus giving rise to a securitization process. The securitization process is considered successful because there is awareness of the threat to tourists and gives rise to actions such as evaluating governance and cooperation between parties. The conclusion of this study is that the Malang Regency Tourism and Culture Office securitizes tourist security by highlighting suboptimal governance and awareness of tourists as an existential threat.

*Keywords: Beach Destinations, Tourist Security, Local Government, Securitization*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata cukup besar yang dapat dilihat dari letak geografis kabupaten Malang yang berada di jalur pantai dan deretan pegunungan, sehingga wisata alam cukup banyak yang dapat dikembangkan (Murniati, 2023). Kabupaten Malang menjadi daerah yang memiliki cukup banyak potensi wisata alam bahari. Berdasarkan penelitian terbaru, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 38,18% terhadap PDRB Kabupaten Malang, menjadikannya salah satu pilar utama perekonomian daerah. Lebih khusus lagi, wisata pantai merupakan salah satu magnet utama kunjungan wisata di Kabupaten Malang. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat mencapai sekitar 3,1 juta orang, dan tren kenaikan terus terjadi setiap tahun. Pantai-pantai di Kabupaten Malang, dengan jumlah destinasi lebih dari 90 titik wisata pantai, telah berkontribusi besar pada angka kunjungan ini.

Menurut data historis, pada 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung bahkan sempat menembus angka 5,8 juta orang, menunjukkan potensi ekonomi wisata bahari yang sangat besar bagi daerah ini. Namun, di balik tingginya angka kunjungan tersebut, keamanan dan keselamatan wisatawan masih menjadi tantangan krusial. Sepanjang tujuh bulan pertama tahun 2023, tercatat 13 kasus kecelakaan air di Kabupaten Malang, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang. Insiden paling menonjol terjadi pada 8 Juli 2023 di Pantai Jembatan Panjang, Kecamatan Bantur, dimana lima wisatawan terseret ombak dan

dua di antaranya meninggal dunia. Selain itu, kasus kecelakaan air lainnya juga terjadi di sejumlah pantai, termasuk Pantai Sendiki dan Pantai Pancer, yang sering kali berakhir tragis akibat belum optimalnya standar pengawasan dan perlengkapan keselamatan di destinasi wisata tersebut.

Kondisi ini menegaskan urgensi penanganan keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai isu prioritas dalam kebijakan pariwisata daerah. Tanpa strategi mitigasi risiko yang memadai, kontribusi ekonomi sektor pariwisata berpotensi terganggu akibat turunnya minat kunjungan. Sejalan dengan rekomendasi World Tourism Organization (WTO), setiap negara maupun pemerintah daerah diharapkan mengembangkan kebijakan keselamatan pariwisata yang selaras dengan upaya pencegahan risiko, untuk memastikan keberlanjutan sektor ini (Tjhing et al., 2024).

Keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi hak wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, menurut Purwokerto (Rivawaty Maretina Sitinjak, 2024), industri pariwisata adalah sektor yang rentan terhadap masalah dan ancaman keamanan yang berarti bahwa *stakeholder* baik pemerintah maupun pengelola atau perusahaan mempertimbangkan risiko bahaya dan perlindungan wisatawan dengan tujuan mengatur seberapa besar ketertarikan wisatawan untuk berkunjung. Meningkatkan upaya perlindungan bagi wisatawan bukan hanya tugas pemerintah terkait, melainkan juga pelaku usaha dan masyarakat sekitar, peran pemerintah untuk mendukung pembangunan fasilitas pariwisata, koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya. Keamanan dan keselamatan wisatawan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola destinasi wisata, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai *stakeholder*. Beberapa temuan penelitian sebelumnya, yang berjudul "*Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura Tahun 1997-2014*", menekankan pada pendekatan institusional melalui kerangka ASEAN dan pendekatan domestik berupa kebijakan nasional.

Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan belum mengkaji bagaimana negara meringkai isu kabut asap sebagai ancaman eksistensial, pentingnya konstruksi ancaman melalui *speech act* masih jarang dikaji, padahal hal ini penting dalam perkembangan isu lingkungan menjadi isu keamanan. Dalam penelitian ini upaya mengatasi keterbatasan dengan teori sekuritisasi untuk memberikan penjelasan bagaimana Pemerintah Singapura menggambarkan isu kabut asap sebagai ancaman keamanan nasional (Gultom, 2016).

Kemudian penelitian dengan judul, "*Proses Sekuritisasi dan Desekuritisasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kasus Covid-19 Di Indonesia*", mengenai sekuritisasi isu non tradisional mengelompokkan pendekatan respon negara dalam dua kategori yaitu pendekatan melalui kebijakan dan pendekatan koersif dengan kekuasaan. Covid-19 dibingkai sebagai isu ancaman eksistensial menggunakan kombinasi kedua pendekatan tersebut. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis deskriptif belum sampai pada mengkaji proses konstruksi ancaman melalui *speech act*, penerimaan audiens dan tindakan yang luar biasa. (Djuyandi et al., 2023). Dan terakhir, penelitian dengan judul "*Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara*", menggunakan pendekatan berbasis penamaan wilayah dilihat sebagai strategi untuk memperkuat posisi negara dalam sengketa maritim. Pendekatan simbolik diplomatik dan penguatan jumlah pertahanan dinilai efektif dalam klaim kedaulatan. Namun penelitian masih fokus pada kebijakan luar negeri dan strategi militer, belum mengkaji secara mendalam proses sekuritisasi melalui konstruksi ancaman atau *speech act* dan persepsi publik. menganalisis keamanan pada kebijakan menggunakan teori sekuritisasi (Muhaimin, 2018).

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan teori sekuritisasi dalam menganalisis isu masih menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi isu keamanan manusia secara luas dan keamanan dan keselamatan wisatawan secara spesifik. Melihat realitas tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses sekuritisasi terhadap ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan seharusnya dilakukan, khususnya pada beberapa destinasi wisata pantai yang perlu disoroti keamanannya, karena kemungkinan resiko kecelakaan wisatawan menunjukkan pentingnya perlindungan luar biasa.

Artikel ini menggunakan *Copenhagen School Securitization Theory* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde sebagai kerangka analisis. Teori ini memandang bahwa isu keamanan tidak bersifat tetap, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial melalui proses yang disebut *sekuritisasi*. Proses ini terjadi ketika seorang *securitizing actor* (aktor sekuritisasi) mengidentifikasi suatu isu sebagai ancaman eksistensial (*existential threat*) terhadap *referent object* (objek yang dilindungi, seperti individu, masyarakat, atau negara) dan mengusulkan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk mengatasinya (Buzan et al., 1998; Trihartono et al., 2020).

Salah satu elemen kunci dalam teori ini adalah *speech act*. Menurut Wæver (1995), *speech act* adalah pernyataan lisan atau tertulis yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk membingkai suatu isu sebagai ancaman yang memerlukan perhatian segera. *Speech act* tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak audiens menerima framing ancaman tersebut agar mendapat legitimasi politik maupun sosial (Lutvihana & Kusuma, 2023). Keberhasilan sekuritisasi sangat bergantung pada penerimaan audiens, karena tanpa legitimasi, isu tersebut tidak akan naik status menjadi isu keamanan. Dalam konteks pariwisata, *speech act* dapat berupa pernyataan resmi pemerintah daerah atau dinas terkait yang menegaskan bahwa faktor keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan destinasi. Misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ketika merespons insiden wisatawan terseret ombak di Pantai Jembatan Panjang. Pernyataan publik yang menyoroti ketiadaan lifeguard dan standar keselamatan yang belum optimal adalah bentuk *speech act* yang mengkonstruksi isu tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi wisatawan, sehingga memerlukan intervensi segera berupa peningkatan SOP keselamatan, pelatihan mitigasi bencana, dan kerjasama lintas sektor.

Dengan demikian, teori sekuritisasi tidak hanya relevan untuk menganalisis isu keamanan tradisional seperti militer, tetapi juga dapat diaplikasikan pada keamanan non-tradisional, termasuk keselamatan wisatawan di destinasi pantai. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana kebijakan pariwisata dapat dipengaruhi oleh narasi ancaman yang dibangun melalui *speech act*, sehingga menghasilkan langkah-langkah kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Kemudian Audience Acceptance berupa proses sekuritisasi yang diselesaikan penerimaan atau penolakan isu dari audiens, yang dapat menjadikan audiens menyadari bahwa isu tersebut menjadi ancaman eksistensial. Audiens yang memberikan respon diantaranya stakeholder, masyarakat, NGO, dan pihak lintas sektor dalam konteks ini, menerima framing isu ini sebagai ancaman pada beberapa destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Malang, dengan tindakan nyata berupa dukungan teknis kepada pemerintah terkait dalam meningkatkan keamanan destinasi wisata pantai.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan utama yaitu, bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Malang menyoroti keamanan destinasi wisata pantai dan mempresepsikan sebagai ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan, dan bagaimana keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan dalam membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata pantai.

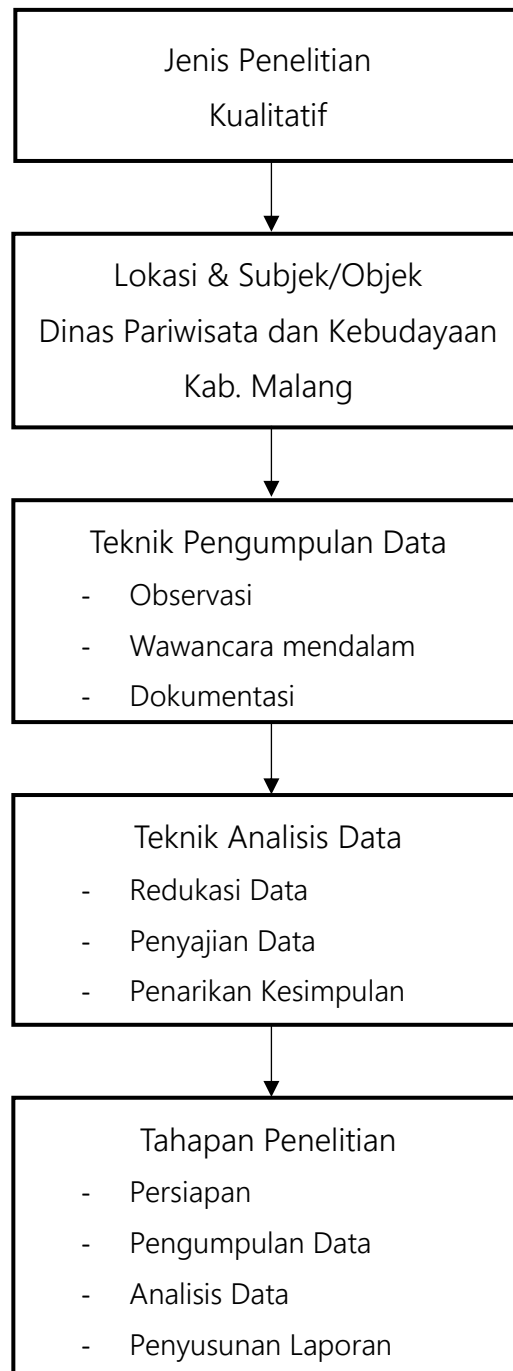
Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada sektor pariwisata melalui pendekatan teori sekuritisasi, penelitian memberikan cakupan yang luas tidak hanya digunakan pada ancaman militer atau politik, namun ke aspek yang lebih non tradisional seperti keamanan individu dalam destinasi wisata. Dan diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai isu keamanan dengan menempatkan keselamatan dan keberlangsungan hidup individu sebagai fokus dalam kebijakan yang akan dibuat oleh *stakeholder*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam merumuskan kebijakan keamanan yang lebih efektif pada destinasi wisata khususnya objek wisata pantai, penelitian ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* atau pelaku industri pariwisata memahami pentingnya persepsi serta penerimaan audiens terhadap upaya yang dilakukan, sehingga upaya yang dilakukan tepat pada sasaran dan mendapat legitimasi sosial. Pada akhirnya keselamatan dan keberlangsungan hidup individu lebih terjamin sehingga berdampak positif pada keberlangsungan sektor pariwisata daerah.

Kajian keamanan pariwisata pada umumnya berfokus pada aspek mitigasi resiko dan pengelolaan fasilitas keselamatan pada destinasi wisata, tetapi belum sepenuhnya menguraikan keamanan dan keselamatan wisatawan dijadikan sebagai isu penting dalam kebijakan publik, khususnya destinasi wisata pantai yang memiliki resiko cukup tinggi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mendingkatkan isu keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata pantai sebagai ancaman yang memerlukan tindakan yang luar biasa, dan penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses sekuritisasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan perlindungan untuk wisatawan pada destinasi wisata pantai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran dengan sebenarnya atau apa adanya dan menguraikan data secara sistematis serta menganalisisnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Lokasi penelitian yang dimaksud peneliti disini adalah tempat peneliti menemukan fenomena dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Malang dan penelitian dilakukan pada saat peneliti menjalani Magang MBKM di lokasi penelitian.



Gambar Ilustrasi Metodologi Peneliti

Dalam penelitian sumber data diperoleh dengan cara (1) Data Primer, diperoleh langsung dari subjek atau informan melalui proses wawancara, informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bapak Budi Susilo selaku Kepala Bidang Destinasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang; (2) Data Sekunder, diperoleh melalui

literatur review seperti buku, jurnal artikel, undang-undang sebagai data ataupun informasi pendukung terkait penelitian. Dalam mendapatkan informasi tentang tata kelola destinasi wisata pantai yang mempengaruhi tingkat keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, data kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya yang sekuritisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dilakukan dengan (1) observasi, mengamati langsung lingkungan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, (2) wawancara, dilakukan langsung dengan informan utama, (3) dokumentasi, untuk mendukung penelitian dan mengakses dokumen pendukung yang relevan. Analisis data dilakukan untuk mencari makna serta menyajikan sebagai temuan (Mouwn Erland, 2020).

Menurut Miles dan Huberman dalam proses analisis ada tiga langkah untuk mengolah data; (1) Reduksi data, cara memilah data ke dalam konsep atau tema tertentu yang meliputi menelusuri tema, meringkas data, mengkode (2) Penyajian data, dengan menyusun informasi yang dapatkan berupa teks naratif, grafik, bahan dan sejenisnya (3) menarik kesimpulan, dilakukan sesuai tahapan oleh peneliti untuk memperoleh penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Menyoroti Keamanan Destinasi Wisata Pantai dan Upaya Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai

Kecelakaan wisatawan pada destinasi wisata pantai disebabkan faktor yang beragam, namun standar keamanan yang belum sepenuhnya di perhatikan menjadi salah satu sebab kecelakaan menimpa wisatawan, diantaranya peraturan keamanan yang dilanggar berkaitan dengan prosedur operasional, bangunan, ifrastruktur yang tidak dirawat dengan baik (Tjhing et al., 2024). Dalam kasus kecelakaan yang terjadi di beberapa pantai di Kabupaten Malang, Bupati Malang mengatakan jika pengelolaan pantai yang belum terstandar perlu di soroti keamanannya. Wawancara yang dilakukan media dengan Bupati Malang di Pantai Jembatan Panjang tempat kecelakaan wisatawan, beliau mengatakan "*pengelolaan wisata belum menerapkan standar penyelamatan, sehingga proses menyelamatkan wisatawan tidak dapat berjalan dengan cepat, seharusnya dipantai terdapat life guard atau petugas pantai untuk mengawasi wisatawan karena pantai salah satu destinasi wisata beresiko dan memerlukan pengawasan*". Singkatnya keberadaan lifeguard merupakan tanggung jawab pengelola sebagai salah satu *stakeholder*, dan belum adanya lifeguard di Pantai Jembatan Panjang pada saat itu sehingga kecelakaan yang menimpa lima wisatawan hanyut tidak ada yang mengawasi aktivitas wisatawan dengan baik. Beliau juga menambahkan "*perlu adanya*

*pembinaan untuk pengelola pantai, karena pengelola sepertinya belum memenuhi standar tata kelola wisata air".*

Kemudian, perlunya menyediakan alat pengaman di pantai, seperti yang di katakan Bupati Malang "*pengelola seharusnya memfasilitasi alat pengaman yang selalu tersedia di menara lifeguard, seperti rompi, cincin apung, perahu karet dan throw bag dan alat bantu pernafasan*". Tiga wisatawan yang hayut dan sedang dalam pencarian tidak menggunakan alat pengaman seperti pelampung (Rizal Adhi Pratama, 2023) .

Berdasarkan penjelasan sebelumnya berdasarkan e-book yang di publikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang mengenai potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2021), wisatawan yang berkunjung ke wisata pantai lebih banyak dan pastinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan wisata pantai yang lebih besar dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya mengharuskan pemerintah untuk terus meningkatkan sarana dan prasana, strategi dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan (Arianto et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang telah mengupayakan strategi dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Susilo, sebagai Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang (wawancara, Selasa 22 April 2025) : "*peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada di destinasi wisata (pengelola, masyarakat setempat, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan wisatawan yang datang), dalam pelatihan tersebut diberikan materi bagaimana pengelola membuat Standard Operating Procedure (SOP) mengenai tata kelola tempat wisata diantaranya SOP evakuasi*". Pelatihan dalam menangani kecelakaan di tempat wisata. Memberikan pelatihan mitigasi bencana, di poin ini pelatihan yang diberikan kepada SDM yang ada pada tempat wisata yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Bapak Budi Susilo menegaskan "*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga melakukan koordinasi dengan pihak pengelola tempat wisata selama ada hal yang memerlukan koordinasi antara dua pihak, salah satunya MoU kerjasama lintas sektor dan bersama sama melakukan simulasi penanganan bencana dan penyelamatan. Lintas sektor yang dimaksud disini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*

*Kabupaten Malang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan BPBD memberikan pelatihan kepada SDM yang ada di sektor pariwisata seperti mitigasi bencana. Pemerintah lintas sektor atau NGO peduli bencana dapat ikut aktif memberikan pelatihan, dengan kata lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tidak secara langsung memberikan pelatihan". Beliau juga menambahkan "Untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan beberapa hal telah diupayakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai stakeholder, menurutnya bagi wisatawan sebagai manusia yang telah dibekali akal untuk berfikir sudah semestinya memiliki pemahaman yang cukup saat hendak melakukan wisata mengenai pemahaman potensi bahaya tempat wisata yang dikunjungi, dengan membiasakan membaca papan peringatan dan pemberitahuan yang disediakan. Meskipun dilain sisi pihak pengelola sudah memiliki mitigasi bencana, seperti penolongan bencana jika ada wisatawan tenggelam pada destinasi wisata pantai, menghubungi tim Public Safety Center untuk kendaraan penolong korban, tetapi masih di ditemukan jika mitigasi yang dilakukan pihak pengelola belum maksimal seperti masih ada wisata pantai yang belum memiliki penjaga pantai dari mercusuar, padahal penjaga pantai dari mercusuar harus ada dalam wisata pantai guna memantau wisatawan secara luas dan lebih mudah sehingga menjadi bentuk mitigasi terjadinya kecelakaan".*

Sekuritisasi Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Perkembangan yang dilakukan oleh beberapa pemikir mengenai keamanan tradisional, salah satunya adalah Barry Buzan yang mengkategorikan cakupan isu keamanan dalam 5 sektor; (1) sektor militer, (2) sektor politik, (3) sektor ekonomi, (4) sektor sosial, (5) sektor lingkungan (Hartono, 2023). Dalam pandangan sekuritisasi Kopenhagen melihat objek yang berada dalam keadaan terancam dan sifatnya penting sehingga harus dipertahankan. Keamanan dan keselamatan wisatawan yang ada pada destinasi wisata yang merujuk pada keamanan individu yang sifatnya terancam menjadi bagian salah satu isu keamanan dalam sektor sosial dan sektor lingkungan serta harus dipertahankan keamanannya. Ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan tidak memiliki makna jika terbatas pada abstraksi aktor (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang) tanpa membangun objek yang dimaksud harus dilindungi dari ancaman eksistensial bagi ketahanan individu sebagai hak dasar yang sudah semestinya dijamin oleh pemerintah (Lutvihana & Kusuma, 2023) .

Keamanan dan keselamatan wisatawan dapat menjadi ancaman individu yang berkunjung pada destinasi wisata pantai karena faktor pendorong yang beragam, diantaranya faktor dari wisatawan itu sendiri yang belum seluruhnya dan sepenuhnya memahami potensi bahaya tempat wisata yang dikunjungi, dengan membiasakan membaca papan peringatan dan pemberitahuan yang disediakan. Kemudian faktor dari pengelola atau perusahaan terkait sebagai *stakeholder* belum maksimal dalam tata kelola seperti masih ada wisata pantai yang belum memiliki penjaga pantai atau lifeguard dari mercusuar yang seharusnya ada dalam destinasi wisata pantai, beberapa diantara faktor tersebut menggambarkan ancaman terkait wisatawan bahwa belum maksimalnya tata kelola dan kesadaran wisatawan itu sendiri dapat menjadi ancaman eksistensial.

Wacana keamanan diidentikkan oleh upaya aktor dalam mengkonstruksi isu sebagai ancaman terhadap keamanan, serta mengharuskan aktor memprioritaskan isu tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menjadi aktor sekuritisasi karena Dinas bagian dari pemerintah daerah otonom pada sektor pariwisata daerah serta memiliki tanggung jawab atas nama pemerintah daerah yang juga sebagai *stakeholder*.

Berhasilnya aktor dalam memperlihatkan suatu isu menjadi ancaman bergantung bagaimana aktor tersebut mewacanakan keamanan, pola ini adalah konsep yang dikembangkan Weaver dan dikenal dengan sebutan sekuritisasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki otoritas membuat keputusan dan menerapkan tindakan darurat (*emergency measures*), artinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki kekuatan diskursif serta kekuatan politik dalam melakukan *securitize* isu tersebut. Aktor melakukan sekuritisasi untuk meminimalisir ancaman non tradisional seperti lingkungan dan sosial. Perubahan eskalasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merubah dari isu bukan keamanan seperti isu sosial dan lingkungan yang ada pada destinasi wisata pantai khususnya menjadi isu keamanan bagi individu khususnya wisatawan dilakukan dengan proses sekuritisasi. Yang perlu diperhatikan ketika pemerintah sebagai aktor melakukan proses sekuritisasi (*securitizing actors*). *Pertama*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai aktor mengidentifikasi suatu isu dalam penelitian ini adalah keamanan dan keselamatan wisatawan yang belum terjamin dan dilakukan secara optimal oleh *stakeholder* maupun wisatawan itu sendiri juga menjadi bagian dari isu sosial dan lingkungan bukan hanya di persepsikan menjadi ancaman saja tetapi dapat diubah menjadi isu keamanan manusia atau individu pada destinasi wisata.

Barry Buzan mendefinisikan aktor sebagai "*who securitize issues by declaring something, a referent object, existentially threatened*". *Referent object* yang dimaksud negara maupun masyarakat yang dilihat secara eksistensial sedang terancam dan perlu diselamatkan, wisatawan dapat menjadi *referent object* dimana masih di dapati keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi ancaman dan perlu tindakan untuk menyelamatkan, sehingga tidak berulang dan menyebabkan korban jiwa lagi dikemudian hari. Isu di golongan ke dalam beberapa macam yang mempengaruhi aktor dalam melakukan sekuritisasi dan melihat isu tersebut sebagai suatu yang mendesak; (1) isu publik (*non politicised*), negara tidak menghiraukan isu tersebut, (2) politisasi, adanya isu tersebut di adopsi oleh negara menjadi kebijakan, (3) sekuritisasi, menangani isu dengan tindakan yang lebih cepat sekalipun harus melanggar hukum (Hartono, 2023). Keamanan dan keselamatan wisatawan dapat di kategorikan sebagai isu publik yang tidak dihiraukan dan tidak selalu negara yang melakukan sekuritisasi, melainkan entitas yang memiliki otoritas seperti pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang).

*Kedua*, kondisi yang mendukung proses sekuritisasi atau memiliki kemampuan memperkuat opini publik dari isu yang disekuritisasi, menurut peneliti dalam hal ini adalah dibuktikan dengan adanya kasus yang menimpa wisatawan menjadi korban kecelakaan pada destinasi wisata. *Ketiga*, unit analisa keamanan adalah individu dan wisatawan khususnya yang berada pada destinasi wisata. *Keempat*, *Speech act*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai aktor sekuritisasi dan aktor politik memiliki pengaruh dalam menjelaskan arti tertentu terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan bukan hanya di persepsikan menjadi ancaman sehingga dilihat sebagai isu yang memerlukan penanganan segera (Lutvihana & Kusuma, 2023).

Pernyataan aktor berperan sebagai *speech act*, yang artinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang membuat pernyataan sebagai *speech act* untuk memfokuskan perhatian audiens dan menekankan pentingnya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan pada destinasi wisata. Dalam pernyataan Kepala bidang Destinasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada saat wawancara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melalui pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Destinasi "*perlunya perhatian lebih terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan dengan melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pengelola terkait berdasarkan himbuan dari pemerintah, apakah sudah di jalankan secara optimal atau belum, karena jika pengelola sudah mengupayakan tata kelola yang baik dengan*

*optimal maka akan meminimalisir kecelakaan yang menimpa wisatawan dan keamanan lebih terjamin".* Dapat dilihat bahwa aktor menyatakan keseriusnya melihat keamanan dan keselamatan wisatawan yang belum optimal dan hal ini menurut peneliti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melihat bahwa keamanan wisatawan sebagai ancaman eksistensial. Pernyataan dikatakan sebagai pola asertif, karena keamanan dan keselamatan wisatawan dinarasikan sebagai tantangan berat yang dihadapi wisatawan itu sendiri maupun *stakeholder*.

*Speech act* yang digunakan pada pernyataan Kepala Bidang Destinasi dan Bupati Malang tersebut menggunakan pola asertif, dengan menyatakan kebenaran jika tata kelola destinasi wisata yang belum optimal dapat menjadi ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan. Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang secara langsung telah membingkai keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan luar biasa (*emergency measures*) untuk penanganannya (Lutvihana & Kusuma, 2023). Kemudian pola komisif yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menurut peneliti, dari pernyataan Kepala Bidang Destinasi yang mengungkapkan komitmen pemerintah terhadap meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan dengan melakukan upaya seperti yang telah dijelaskan pada bagian pernyataan Kepala Bidang Destinasi pada saat wawancara dengan peneliti dan pernyataan Bupati Malang pada saat wawancara dengan Media.

Filsuf J.L. Austin dikaitkan dengan gagasan *speech act*, menurutnya *speech act* bukan sekedar pernyataan tetapi juga tindakan atau upaya (Hartono, 2023), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tidak hanya membuat pernyataan mengenai ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan tetapi juga mengupayakan tindakan yang dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan. Karena pada saat pemerintah yang memiliki otoritas dan sebagai *stakeholder* mengatakan bahwa keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi ancaman pada saat tata kelola dan kesadaran wisatawan itu sendiri belum optimal, artinya semua sumber daya harus di prioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut (Lutvihana & Kusuma, 2023).

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang telah mengkonstruksi ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi ancaman signifikan bagi destinasi wisata yang ada pada sektor pariwisata daerah, tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sudah menunjukkan keseriusannya dalam

meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan melalui berbagai upaya yang telah dilakukan baik yang dilakukan secara mandiri maupun melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan koordinasi dengan pengelola terkait. Namun, masalah yang masih di dapati seperti tata kelola destinasi wisata yang belum optimal dilakukan oleh pengelola meskipun sudah mendapatkan himbauan dari pemerintah dan kurangnya pemahaman yang cukup saat hendak melakukan wisata mengenai pemahaman potensi bahaya tempat wisata yang dikunjungi. Dinas Pariwisata belum memprioritaskan ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan dalam kebijakan sektor pariwisata daerah, tetapi akan berkomitmen memperkuat aspek dan evaluasi tata kelola destinasi wisata pantai pada sektor pariwisata daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang belum sepenuhnya menunjukkan konsistensinya terhadap ancaman keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai ancaman eksistensial bagi keberlangsungan hidup objek atau individu khususnya wisatawan, karena tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga fokus pada aspek lain seperti pengembangan dan promosi pariwisata daerah, tetapi dilain sisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sudah berkomitmen dalam menagani isu keamanan dan keselamatan tersebut. Kemudian, menurut peneliti *speech act* yang semestinya dilakukan sebagai bentuk komunikasi dari aktor sekuritisasi dan audiens untuk menciptakan kesepahaman mengenai ancaman tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya peran media.

Melalui peran media massa, eksistensi keamanan dan keselamatan wisatawan yang terancam akan terlegitimasi. Media massa menjadi penghubung bagi aktor dengan audiens atau komunitas yang akan dipengaruhi melalui *speech act* (media menjadi penghubung antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat melalui *speech act* yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata), karena media dimanfaatkan sebagai wadah untuk memulai . Peran media yang lekat dengan kemampuannya dalam menyampaikan informasi dapat memberikan kesempatan bagi aktor sekuritisasi dalam menyampaikan *speech act* kepada audiens. Dalam analisis peneliti, media massa lokal membantu memulai *speech act* dari informasi beberapa kali terjadinya kecelakaan yang menimpa wisatawan melalui media publik. Misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai pemerintah yang memiliki otoritas dalam sektor pariwisata daerah dapat menggunakan media digital dan sebagainya untuk menyebarkan peringatan bahayanya tata kelola destinasi wisata yang belum optimal dan kurangnya pemahaman wisatawan terhadap destinasi wisata akan berdampak pada keamanan dan

keselamatan wisatawan. Selanjutnya media dapat membantu menyampaikan pesan pemerintah agar para *stakeholder* atau pemangku kepentingan terlibat secara maksimal dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan. Yang terakhir media menyediakan akses yang dapat diakses secara luas oleh audiens.

Terakhir, sekuritisasi yang mengarah pada pembuatan kebijakan yang seharusnya tidak sah atau *extraordinary measures* (Lutvihana & Kusuma, 2023). Dalam konteks ini, tindakan luar biasa dari proses sekuritisasi keamanan dan keselamatan wisatawan berupa strategi meningkatkan upaya keamanan dan keselamatan wisatawan atau mitigasi, evaluasi berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai tata kelola destinasi wisata tersebut.

## SIMPULAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan sekuritisasi keamanan wisatawan dengan menyoroti tata kelola dan kesadaran wisatawan yang belum optimal sebagai ancaman eksistensial. Penelitian ini memperluas teori sekuritisasi yang diterapkan dalam pariwisata lokal yang sebelumnya belum banyak di bahas, dengan justifikasi ilmiah pentingnya perlindungan individu pada destinasi wisata. Temuan ini diharapkan dapat diterapkan dalam menyusun kebijakan keamanan wisatawan dan membangun kesadaran publik mengenai keamanan wisatawan adalah hal yang memerlukan tindakan luar biasa. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap tata kelola destinasi wisata bersama *stakeholder* lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, E. R. (2017). Pengaruh Daya Tarik Wisata Dan Fasilitas Layanan Terhadap Kepuasan Wisatawan di Pantai Ampenan Mataram. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 51(2), 51.
- Arianto, M. E., Saptadi, J. D., & Rifai, M. (2022). Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>
- Dian Kurniawan. (2023). *5 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jembatan Panjang Malang, 2 Orang di Antaranya Warga Asing*. Liputan6.Com. [https://www.liputan6.com/surabaya/read/5339687/5-wisatawan-terseret-ombak-di-pantai-jembatan-panjang-malang-2-orang-di-antaranya-warga-asing?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.liputan6.com/surabaya/read/5339687/5-wisatawan-terseret-ombak-di-pantai-jembatan-panjang-malang-2-orang-di-antaranya-warga-asing?utm_source=chatgpt.com)

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (2021). *PROFIL KABUPATEN MALANG EDISI 2021* (p. 101). malangkab-pusat-opd. [https://portal.malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-PROFIL KABUPATEN MALANG lengkap revisi3\(juni\)\\_FIX.pdf](https://portal.malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-PROFIL KABUPATEN MALANG lengkap revisi3(juni)_FIX.pdf)
- Djuyandi, Y., Aiman Nadhir, H., Amaliya Pohan, A., Smaradana, D., Naura Priadi, A., Raya Bandung Sumedang, J. K., & Sumedang, K. (2023). Proses Sekuritisasi Dan Desekuritisasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kasus Covid -19 Di Indonesia. *Wacana Publik*, 17(01), 1–12.
- Gultom, K. (2016). Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura, 1997-2014. *Indonesian Perspective*, 7(2), 141–157. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i2.14288>
- Hartono, B. (2023). Copenhagen School: Sekuritisasi. *Academia.Edu*, 2007, 16. [https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen\\_School\\_Sekuritisasi](https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi)
- Lutvihana, Y., & Kusuma, A. (2023). Mengurai Proses Sekuritisasi Krisis Iklim di Sudan Selatan Tahun 2016-2021. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2), 393–411. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.51292>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasini* (Issue March).
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utra. *Jurnal POLITICA*, 9(Mei), 17–37. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1237>
- Murniati. (2023). *Economics and Digital Business Review Strategy Pengembangan Pariwisata Kabupaten dengan Pendekatan GIS dan Photo Mapping Malang*. 4(1), 462–469.
- Rivawaty Maretina Sitingjak, R. D. E. (2024). Evaluasi Tingkat Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Di Kabupaten Toba Sebagai Destinasi Pariwisata. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 120–133.
- Rizal Adhi Pratama. (2023). *Wisatawan Hanyut, Keamanan Pantai Jembatan Panjang Malang Disorot*. IDN TIMES JATIM. [https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/wisatawan-hanyut-keamanan-pantai-jembatan-panjang-malang-disorot-01-q9yfq-zz9zp6?utm\\_source=chatgpt.com](https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/wisatawan-hanyut-keamanan-pantai-jembatan-panjang-malang-disorot-01-q9yfq-zz9zp6?utm_source=chatgpt.com)
- Tjhing, M. lie, Rusmini, A., & Lestariningsih, T. (2024). Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung pada Destinasi Wisata. *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 80–90. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i1.95>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan

Internasional. In *Melvana Publishing* (Issue 8).  
[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel\\_4\\_Agus\\_Tri.pdf](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel_4_Agus_Tri.pdf)